

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan energi di Kurdistan Irak dikonstruksikan oleh KRG sebagai *existential threat* terhadap keberlangsungan otonomi politik dan ekonomi mereka. Otonomi Kurdistan Irak bergantung secara langsung pada kendali atas sumber daya energi, terutama minyak dan gas alam, yang menjadi tulang punggung keuangan, administratif, dan simbolik bagi entitas politik Kurdi dalam kerangka negara Irak. KRG mengangkat kemudian isu energi ke dalam ranah keamanan tinggi melalui *speech acts* yang dilakukan oleh para petinggi KRG, khususnya Perdana Menteri Masrour Barzani. Barzani secara eksplisit menyebut ancaman-ancaman tersebut sebagai tantangan eksistensial bagi masa depan Kurdistan.

Dalam proses sekuritisasi, KRG memainkan peran sebagai *securitizing actor*, sementara energi menjadi *referent object* yang harus dilindungi demi mempertahankan otonomi. Dukungan atau penolakan terhadap narasi sekuritisasi ini datang dari berbagai *functional actors* seperti Pemerintah Irak, Turki, Iran, Amerika Serikat, hingga Israel, serta aktor internal seperti KDP dan PUK. Narasi sekuritisasi juga digunakan oleh KRG untuk membenarkan berbagai *extraordinary measures*, termasuk menjalin kerja sama langsung dengan pihak asing, mempertahankan kekuatan militer Peshmerga, dan memperkuat kontrol terhadap wacana publik domestik.

Berdasarkan pola dinamika yang teridentifikasi selama periode 2019–2025, dapat diproyeksikan bahwa keberlangsungan otonomi Kurdistan Irak ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan KRG dalam mengelola tiga pilar utama secara

strategis, yaitu sektor energi, konsolidasi politik internal, dan hubungan eksternal. Ketiganya saling berkaitan dan akan menentukan sejauh mana KRG dapat.

Masa depan otonomi Kurdistan Irak sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola ketahanan energi, konsolidasi politik internal, dan diplomasi eksternal. Dalam bidang energi, KRG perlu mengurangi ketergantungannya terhadap sektor minyak dan mulai mengembangkan infrastruktur di sektor gas alam. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka keran investasi terhadap aktor eksternal dan memperkuat posisi hukumnya dalam negosiasi dengan Baghdad. Secara internal, konflik antara KDP dan PUK harus diselesaikan dengan melakukan reformasi dalam KRG demi menjaga kohesi domestik yang menjadi syarat berhasilnya sekuritisasi. Sementara itu, dalam aspek eksternal, keberhasilan KRG menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat, Turki, Iran, dan pemerintah pusat Irak akan menentukan apakah wilayah ini mampu bertahan sebagai entitas semi-otonom yang stabil atau justru terseret dalam konflik geopolitik Timur Tengah.

Secara keseluruhan, terdapat dua kemungkinan dalam proyeksi masa depan Kurdistan Irak ke depan. Kemungkinan pertama, jika langkah-langkah konsolidatif dan strategis di bidang energi, politik, dan diplomasi berhasil dijalankan secara bersamaan, maka KRG dapat terus mempertahankan eksistensinya sebagai entitas otonom *de facto* yang diakui secara fungsional oleh komunitas internasional. Kemungkinan kedua, jika fragmentasi internal terus memburuk, ekspor energi tetap tergantung pada satu jalur, dan diplomasi hanya bersifat reaktif, maka otonomi KRG akan terus berada dalam kondisi rapuh dan rawan intervensi dari Baghdad. Dengan demikian, masa depan otonomi Kurdistan Irak sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mentransformasikan sekuritisasi dari sekadar strategi bertahan menjadi alat konsolidasi kekuasaan, diplomasi, dan pembangunan jangka panjang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, KRG disarankan untuk memperkuat konsolidasi internal antara KDP dan PUK agar strategi sekuritisasi terhadap isu energi dapat dijalankan secara lebih efektif dan solid. Pemerintah Irak juga perlu mengedepankan pendekatan dialog dan menghormati otonomi konstitusional KRG demi menjaga stabilitas nasional. Bagi komunitas internasional dan investor energi, penting untuk memahami dinamika politik dan sensitivitas lokal di wilayah Kurdistan, sehingga keterlibatan mereka tidak memperburuk ketegangan yang ada. Secara akademik, penelitian ini membuka ruang untuk studi lanjut tentang penerapan teori sekuritisasi dalam konteks pasca konflik dan relasi pusat-daerah di kawasan Timur Tengah. Selain itu, penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji dinamika sekuritisasi di Kurdistan Irak dengan pendekatan yang lebih komparatif dengan wilayah otonom lain di kawasan Timur Tengah, seperti Rojava di Suriah. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggali lebih dalam keterlibatan aktor non-negara, masyarakat sipil, serta respons publik terhadap wacana sekuritisasi yang dibentuk oleh elite politik. Dengan demikian, pemahaman mengenai sekuritisasi tidak hanya terbatas pada aktor negara atau sub-nasional, tetapi juga mencakup dinamika sosial dan kultural yang lebih luas dalam konstruksi ancaman dan upaya mempertahankan eksistensi politik.